**PENGARUH SISKEUDES, SPIP, KOMPETENSI APARAT PENGELOLAAN DANA, PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA**

**(Studi Kasus Pada Desa di Kec. Limbangan Kab. Kendal)**

**Yanny Widiastuty Gunawan**

Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa Semarang

e-mail: [yanny@aeterbag.ac.id](mailto:yanny@aeterbag.ac.id)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui melalui random sampling efektivitas siskeudes, SPIP, kompetensi aparat pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Administrator melindungi keuangan desa, peran pengelolaan ekonomi di desa dan pengaruh massa berpartisipasi dalam akuntabilitas dalam mengelola keuangan

Penelitian laksanakan di Desa pada Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Data-data tersebut merupakan satu-satunya data dan temuan yang diperoleh dari tanggapan responden melalui kuesioner yang dikirimkan dan disebarkan kepada anggota BPD di Kecamatan Limbangan. Analisis data menggunakan software SPSS 21.0 untuk analisis regresi berganda, kewenangan kepala desa dan tetua desa serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya desa.

**Kata kunci**: *Kompetensit; Partisipasi; Pengelolaan; Siskeudes; SPIP*

***Abstract***

*The aim of this research is to determine through random sampling the effectiveness of siskeudes, SPIP, the competence of village fund management officials and community participation in the accountability of village fund management. The administrator protects village finances, the role of economic management in the village and the influence of the masses participating in accountability in managing finances*

*The research was carried out in a village in Limbangan District, Kendal Regency. These data are the only data and findings obtained from respondents' responses through questionnaires sent and distributed to BPD members in Limbangan District. Data analysis used SPSS 21.0 software for multiple regression analysis, the authority of the village head and village elders and community participation in managing village resources.*

***Keywords:*** *Competence; Participation; Management; Siskeudes; SPIP*

**PENDAHULUAN**

Pada saat ini, pemerintah menganggap pembangunan pedesaan sebagai tahap pertama pembangunan. Mendorong desa kaya dan terkelola dengan baik akan mendorong pembangunan manusia. Pemerintah memberikan pendapatan desa dari Dana Anggaran dan Belanja Negara (APBN), dan pemerintah menerapkan berbagai peraturan keuangan desa untuk meningkatkan penggunaan dana desa. Hibah Perdesaan adalah hibah yang diberikan oleh APBN kepada daerah pedesaan melalui kabupaten atau kota untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sumber daya yang ada, antara lain sumber daya alam dan tenaga kerja. Tanggung jawab desa adalah mengelola kekayaan desa dan menyelenggarakan kegiatan desa untuk mencapai kesejahteraan desa.

Pemerintah pusat menyediakan dana pembiayaan perumahan di pedesaan untuk meningkatkan biaya pembangunan, operasional, dan pemberdayaan (Aprilya & Fitria, 2020). Tata kelola dan pengelolaan aset desa yang baik akan memberikan informasi yang akurat, komprehensif dan tepat sehingga menghasilkan akuntabilitas yang lebih baik dan kuat. Akuntansi mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengelolaan perekonomian desa, sehingga mempengaruhi kemampuan pemerintah desa dalam menyikapi pekerjaan yang dilakukan sehingga merangsang perkembangan pemerintahan.

Rustiani (2016)) berpendapat bahwa kredit perumahan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sudah banyak mengirimkan uang ke desa, sehingga pemerintah juga harus mewajibkan desa untuk mengelola uang tersebut dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah juga menganut prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan perekonomian desa, dengan meminta pertanggungjawaban dinas pemerintahan di desa untuk mencapai pengelolaan perumahan yang baik. Tanggung jawab pengelolaan aset desa banyak faktor, antara lain penggunaan rencana pendapatan desa (Siskeudes), rencana pengelolaan investasi pemerintah (SPIP), pengetahuan pemilik kekayaan perumahan, dan keterlibatan anggota desa.

Siskeudes adalah sistem keuangan desa. Organisasi yang dibentuk adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Siskeudes merupakan alat yang membantu pemerintah daerah mengelola, melaksanakan, mengelola, melaporkan dan memperhitungkan biaya komputer (Juardi et al., 2018). Siskeudes bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa. Siskeudeses menggunakan pendekatan akuntansi dan logika untuk menghitung seluruh biaya desa. Salah satu tujuan perencanaan keuangan internal organisasi adalah untuk memelihara informasi keuangan.

Partisipasi manusia merupakan salah satu faktor yang menyukseskan pembangunan dan kemajuan. Warga masyarakat tidak hanya harus memikirkan pembangunan saja, namun juga harus mengenali permasalahan dan bencana yang ada di masyarakat atau desa tersebut. Komunitas juga penting dalam konteks ini, tanpa layanan sosial, pembangunan dan layanan yang mencerminkan permasalahan dan kekuatan komunitas (Pahlawan dkk, 2020). Tanggung jawab yang mempengaruhi keberhasilan dan pengembangan program pedesaan. Masyarakat dilibatkan tidak hanya untuk memikirkan pembangunan tetapi juga untuk mengidentifikasi permasalahan dan bahaya yang ada di masyarakat atau desa.

Dalam konteks ini, komunitas juga penting dan tidak ada layanan sosial, pembangunan, dan kegiatan apa pun yang dapat mencerminkan permasalahan dan kekuatan yang ada di komunitas (Pahlawan dkk, 2020).

Berdasarkan permasalahan yang ada maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Siskeudes telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan dana desa?
2. Apakah SPIP berdampak positif terhadap tanggung jawab pengelolaan dana desa?
3. Apakah keterampilan petugas pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap tanggung jawab pengelolaan dana desa?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap tanggung jawab pengelolaan dana desa?

**TELAAH PUSTAKA**

**Sistem Keuangan Desa**

Program KPR merupakan keberhasilan kemitraan antara pemerintah pusat dan Badan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyoroti penggunaan siskeudes melalui surat B.7508/01-16/08/2018 pada 31 Agustus 2016, meminta pemilik desa di Indonesia untuk mengetahui lebih jauh penggunaan siskeudes. Ketahui pendapatan desa Anda. Sistem ini juga membantu pemerintah daerah atau kota memantau, mengelola, dan memantau bangunan. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah masuk ke dalam sistem. Dengan cara ini, pengguna siskeudes dapat menghemat waktu dan uang dalam pengelolaan data serta mengurangi risiko penipuan dan kesalahan dalam pelaporan keuangan elektronik (Afriansyah, 2020)

**Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Pengendalian internal mencakup rencana organisasi untuk memelihara atau melindungi aset dan menyediakan informasi yang tepat. Peran pemerintah desa adalah mendukung masyarakat dengan memberikan laporan keuangan kepada masyarakat dan mengawasi pengelolaan keuangan desa. Pengendalian ini dilaksanakan sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kinerja internal organisasi ini menjadi rekomendasi penerapan sistem manajemen manajemen kesetaraan terjemahan. Komponen SPIP adalah:

1. Lingkungan operasi adalah seluruh unit operasi dasar yang membentuk infrastruktur
2. Praktik manajemen adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan diambil untuk mengatasi masalah bisnis yang teridentifikasi.
3. Penilaian risiko adalah proses penilaian risiko terjadinya peristiwa yang mengancam pencapaian tujuan dan inisiatif pemerintah.

**Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa**

Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang membuat seseorang lebih jernih dari pada pikiran. Dengan mengidentifikasi jenis pengetahuan dan keterampilan pribadi yang diperlukan untuk pekerjaan itu, Anda akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda dengan lebih efektif. Hal ini sesuai dengan standar teknis tertinggi (Kompri, 2017). Menurut UU no. Ayat 2 Pasal 233 UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah meliputi pengetahuan, gagasan, dan keterampilan terkait dengan kebijakan zonasi, hubungan antar negara, pengelolaan perekonomian daerah, dan lain-lain. lebih dari. Keterampilan umum mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Sekarang, pengetahuan dapat didefinisikan sebagai jumlah pengetahuan, keterampilan dan kualitas seseorang. Kekuasaan tuan desa dapat dicapai melalui pengetahuan, pemahaman dan keterampilan. Dalam rangka mendorong pembangunan desa sehat, kemampuan tersebut dinilai penting dalam berbagai kegiatan. Mereka harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu (Umaira & Adnan, 2019).

**Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat penting bagi pemerintah untuk mengelola pendapatan desa. Manusia mengetahui bagaimana melakukan interaksi sosial dalam keadaan tertentu. Partisipasi masyarakat juga memberikan peluang untuk mengidentifikasi permasalahan dan risiko yang ada di masyarakat. Dalam kegiatan tersebut masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk mencari solusi yang berbeda, mengatasi permasalahan dan mencoba menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat (Pratiwi & Dewi, 2021). Menurut Cohen & Naimah (2017), ada banyak jenis peluang antara lain: (1) Harus ada peluang untuk mengambil keputusan berdasarkan ide atau kepentingan bersama untuk memastikan keberhasilan pembangunan, (2) Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan tanggung jawab masyarakat untuk melaksanakan program, termasuk pengelolaan keuangan dan pembangunan, serta perencanaan dan pelaksanaan program; (3) Harus ada akses terhadap manfaat, tergantung pada kualitas dan kuantitas hasil. Sedangkan kualitas, seperti peningkatan produksi, kualitas, seperti keberhasilan program pengelolaan pendapatan desa; (4) Harus ada kesempatan untuk memantau kemajuan proyek, yang berarti memastikan bahwa semua proyek berjalan sesuai rencana dan rencana.

**Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Dewi & Gayatri, (2019) Akuntabilitas adalah konsep bahwa masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan menunjukkan adanya proses keuangan, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan yang ditunjukkan dan dijelaskan oleh DPRD dan masyarakat. Menurut Ardiyanti (2019), akuntabilitas adalah tanggung jawab memberikan pertanggungjawaban dan respon terhadap tindakan pemimpin organisasi. Akuntabilitas adalah nilai, efektivitas, keandalan, dan prediktabilitas tanggung jawab seseorang terhadap masyarakat atau masyarakat luas. Sifat akuntabilitas Ardiyanti mencakup beberapa aspek akuntabilitas, yaitu: Hukum dan Kejujuran, Tanggung Jawab Administratif, Komitmen Proyek, Komitmen Finansial.

**Kerangka Pikir Teori**

Sistem Keuangan Desa

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa

**Hipotesis**

Partisipasi Masyarakat

**Gambar 1.1** Kerangka Pikir Teorotis

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dijelaskan di atas, maka dibentuk hipotesis sebagai berikut :

1. Sistem keuangan desa berkontribusi terhadap pendapatan dana desa
2. Sistem pengelolaan internal pemerintah berdampak positif terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan desa
3. Dampak positif tenaga keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa
4. Partisipasi masyarakat mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan desa

**METODE PENELITIAN**

Populasi adalah kumpulan segala sesuatu, misalnya peristiwa, benda, atau orang-orang yang mempunyai sifat serupa, yang mendapat perhatian seseorang (Tarjo, 2019). Subyek penelitian ini adalah anggota BPD di Kecamatan Limbanggan Kabupaten Kendal. Teknik *random sampling* digunakan untuk mengumpulkan sampel, dan software SPSS (Ghozali, 2006) digunakan untuk analisis data. Sampel penelitian ini adalah anggota BPD di Kecamatan Limbanggan Kabupaten Kendal. Desa sampel dipilih secara acak, sehingga terpilih total 103 desa.

Saat ini penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar di beberapa desa di Kecamatan Limbangan untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai tanggapan responden serta menguji keakuratan dan keasliannya. Metode ini menggunakan skala likert 1-5.

**PEMBAHASAN**

**Uji Validitas**

Uji yang penting dan efisien dapat dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel, jika R tabel < R hitung maka keputusan tidak sah, namun jika R hitung > R maka keputusan sah. Keputusan ini benar.

**Tabel 1.**Hasil Uji Validitas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | ***Corrected Item-Total Correlation*** | **r-Tabel** | **Keterangan** |
| VY1 | 0,465 | 0,192 | Valid |
| VY2 | 0,436 | 0,192 |
| VY3 | 0,231 | 0,192 |
| VY4 | 0,374 | 0,192 |
| VY5 | 0,326 | 0,192 |
| VY6 | 0,357 | 0,192 |
| SIS1 | 0,484 | 0,192 |
| SIS2 | 0,384 | 0,192 |
| SIS3 | 0,383 | 0,192 |
| SIS4 | 0,460 | 0,192 |
| SPIP1 | 0,410 | 0,192 |
| SPIP2 | 0,287 | 0,192 |
| SPIP3 | 0,517 | 0,192 |
| SPIP4 | 0,411 | 0,192 |
| SPIP5 | 0,325 | 0,192 |
| SPIP6 | 0,376 | 0,192 |
| KAP1 | 0,379 | 0,192 |
| KAP2 | 0,457 | 0,192 |
| KAP3 | 0,350 | 0,192 |
| KAP4 | 0,467 | 0,192 |
| KAP5 | 0,242 | 0,192 |
| PM1 | 0,526 | 0,192 |
| PM2 | 0,569 | 0,192 |
| PM3 | 0,464 | 0,192 |
| PM4 | 0,464 | 0,192 |

Berdasarkan tabel diatas terlihat perhitungan nilai r variabel Siskeudes (X1), SPIP (X2), Kapasitas aparat pengelola keuangan desa (X3), dan partisipasi masyarakat (X4 ) untuk mengelola pinjaman rumah. Beban (Y) dihitung dari r tabel. Oleh karena itu indeks Siskeudes, SPIP, Keahlian Petugas Pengelolaan Keuangan Desa dan Keterlibatan Sosial dianggap benar dan semua nilai hitung > 0,192 dihitung dari r tabel, sehingga data dianggap benar semua.

**Uji Reliabilitas**

**Tabel 2.** Hasil Uji Reliabilitas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cronbach’s Alpha if**  **Item Deleted** | **Standar Deviasi** | **Keterangan** |
| Akuntabilitas (Y) | 0,738 | 0,70 | Reliabel |
| Siskeudes (X1) | 0,731 | 0,70 | Reliabel |
| SPIP (X2) | 0,732 | 0,70 | Reliabel |
| Kompetensi (X3) | 0,748 | 0,70 | Reliabel |
| Partisipasi Masyarakat (X4) | 0,707 | 0,70 | Reliabel |

Hasil pengetahuan aparat pengelola keuangan desa dan keterlibatan masyarakat dalam tanggung jawab pengelolaan keuangan desa menunjukkan nilai Croancbach Alpha > 0,70 sehingga dianggap reliabel. Berdasarkan hasil Siskeudes SPIP, aparat pengelola keuangan desa mempunyai reliabilitas dan partisipasi sosial dengan nilai Croancbach Alpha > 0,70.

**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model multikolinearitas yang baik adalah yang memenuhi kriteria uji klasik yaitu model harus normal dan model harus bebas multikolinearitas. Analisis sebelumnya menunjukkan bahwa model penelitian memenuhi asumsi pertama, sehingga model ini baik. Model regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan SPSS 21.0 dan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.** Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | | |
| Model | | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 9,325 | | 2,440 |  | 3,821 | 0,000 |
| Siskeudes | 0,430 | | 0,140 | 0,306 | 3,074 | 0,003 |
| SPIP | 0,151 | | 0,092 | 0,164 | 1,632 | 0,106 |
| Kompetensi | 0,059 | | 0,111 | 0,054 | 0,535 | 0,594 |
| Partisipasi Masyarakat | 0,191 | | 0,112 | 0,181 | 1,708 | 0,091 |
| a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS | | | | | | | |

Kolom koefisien tidak terstandar (B). Terlihat nilai aktual sebesar 9,325, Siskeudes sebesar 0,430, SPIP sebesar 0,151, kapasitas aparat pengelola keuangan desa sebesar 0,059, dan partisipasi masyarakat sebesar 0,191. Model persamaan regresi linier berganda berikut dapat dibangun:

APDD = α +β1 SIS+β2 SPIP+β3 KAP+β4 PM+ e

APDD = 9,325 +β1 0,430 +β2 0,151+β3 0,059+β4 0,191 + e

komentar:

1. Nilai positif dari nilai 9,325 sama dengan 0, jadi nilai dari nilai tersebut adalah 9,325.
2. Nilai koefisien Siskeudes sebesar 0,430 dan sig sebesar 0,003<0,05 menunjukkan bahwa Siskeudes berpengaruh positif terhadap respon pengelolaan pendapatan desa.
3. Nilai SPIP sebesar 0,151 sig 0,106 > 0,05 sehingga dapat dijelaskan bahwa SPIP tidak bermanfaat dalam pengelolaan perekonomian pedesaan.
4. Nilai keterampilan pengelolaan kekayaan desa sebesar 0,059 dan simbolnya 0,594>0,05 sehingga dapat ditunjukkan bahwa keterampilan pengelolaan kekayaan desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan kekayaan desa di tingkat desa.
5. Nilai partisipasi masyarakat sebesar 0,191 dan nilai sig sebesar 0,091>0,05 sehingga dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap respon pengelolaan keuangan desa.

**Hasil Uji t**

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen dengan cara menampilkan t hitung untuk masing-masing variabel dan membandingkannya dengan t tabel. Terlihat dari statistik uji t jika probabilitas positif palsu < 0,05 maka Ho diterima. , efek parsial. Apabila probabilitas error > 0,05 Ha ditolak maka tidak terjadi pengaruh secara parsial.

**Tabel 4.** Hasil Uji t

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | |
| **Model** | | **t-Tabel** | **Sig.t** | **Keterangan** |
| 1 | (Constant) |  | 0,000 |  |
| Siskeudes | 1,659 | 0,003 | Hipotesis 1 diterima karena sig < 0,05 |
| SPIP | 1,659 | 0,106 | Hipotesis 2 ditolak karena sig > 0,05 |
| Kompetensi | 1,659 | 0,594 | Hipotesis 3 ditolak karena sig > 0,05 |
| Partisipasi Masyarakat | 1,659 | 0,091 | Hipotesis 4 ditolak karena sig > 0,05 |
| a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS | | | | | |

1. Nilai signifikansi indeks siskeudes sebesar 0,003 < probabilitas 0,05 dan dapat disimpulkan hipotesis 1 diterima yaitu siskeudes berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Hipotesis 2 menjelaskan nilai signifikansi SPIP dan nilai indikator 0,106 > probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan hipotesis 2 ditolak yang berarti SPIP tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan pendapatan desa.
3. Hipotesis 3 menjelaskan signifikansi variabel pengelolaan keuangan pertama dengan skor sebesar 0,594 > probabilitas 0,05 sehingga dapat dikatakan hipotesis 3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh terhadap kemampuan pelayanan manajer bank prioritas pertama. manajer bank. Kemampuan untuk mengurus pengeluaran desa. Terlibat dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Hipotesis 4 menggambarkan pentingnya kebijakan sosial, dengan nilai sig sebesar 0,091 > probabilitas 0,05 maka dapat dikatakan hipotesis 4 ditolak yaitu partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap status administratif. Pinjaman Perumahan.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil yang dibahas di atas, maka::

1. Kualitas pengelolaan perekonomian desa (Siskeudes) yang dilakukan pemerintah desa mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan, perluasan, dan peningkatan perekonomian desa. Pemilik rumah yang memiliki keterampilan yang baik seperti pengetahuan, keterampilan, dan etika akan mampu bekerja secara efisien dan efektif setiap saat, sehingga menghasilkan pengelolaan rumah dan pekerjaan yang lebih baik, serta peningkatan tanggung jawab dalam mengelola aset rumah.
2. SPIP tidak mempengaruhi besar kecilnya tanggung jawab pengelolaan aset desa, karena besar kecilnya SPIP tidak mempengaruhi besarnya tanggung jawab pengelolaan harta desa.
3. Kemampuan pengelola keuangan desa tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan desa karena tingkat pengetahuan profesional yang dimiliki seseorang tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan desa.
4. Partisipasi masyarakat tidak mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan harta desa, begitu pula ada tidaknya anggota masyarakat tidak mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan harta desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aprilya, K. R. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntatabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. e-ISSN: 2460-0585, 1-20.

Arfiansyah, M. A. (2020). Januari-Mei). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*. Vol. 3, No. 1, Januari-Mei 2020, 3, 67-82.

Citra Kumala Dewi, M. I. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa DI Kecamatan Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan. Bomba: *Jurnal Pembangunan Daerah* 1(2) (2019) : 57 - 64 ISSN (Cetak): 2657 -2478 E- ISSN (Elektronik): 2715-1026, 57-64.

Desy Nur Pratiwi, Y. A. (2021). Analisis Penggunaan Siskeudes Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol 20, No.2. 217-223, 183-198.

Ghozali, Imam. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Muhammad Sapril Sardi Juardi, M. M. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE), 84-107.

Pahlawan, Enggar Wahyuning. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Jurnal*, Vol. 2, No. 2.

Siti Umaira, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyrakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 4, No. 3, (2019) Halaman 471-481 E-ISSN 2581-1002, 471-481.

Tarjo. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram.* Vol. 5, No 2 September 2019, 331-346.